

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu komponen wajib yang ada pada setiap lembaga. Lembaga yang telah menyusun laporan keuangan akan memperoleh berbagai informasi mengenai kinerja keuangan dalam periode yang sedang berjalan atau pada periode tertentu. Hal ini sangatlah penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi lembaga publik seperti Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan sebuah instansi sektor publik yang memiliki kewenangan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban dalam mengelola setiap kegiatannya.

Pemerintah Daerah memiliki tuntutan untuk membuat laporan mengenai anggaran yang telah digunakan dan harus dipertanggungjawabkan pada khalayak umum yaitu masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah atau organisasi sektor publik yang disebut sebagai suatu organisasi yang mengelola masyarakat harus dapat memberikan laporan pertanggungjawabannya salah satunya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan wajib disusun oleh Pemerintah untuk mengetahui sejauh mana proses pengelolaan serta penilaian kinerja dalam

pengelolaan keuangan daerah di setiap periode anggarannya (Aprisyah & Yuliati, 2021).

Pemerintah dalam menjalankan tugas keberhasilannya dapat diukur dengan melihat bagaimana tujuan yang dirancang telah dicapai sesuai dengan sasaran. Pemerintah Daerah turut andil dalam memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah tertentu. Kerjasama sangatlah diperlukan dalam mewujudkan koordinasi yang jelas dan teratur sebagai penunjang keberhasilan pada suatu program kegiatan agar terintegrasi dengan baik (Nasution & Nurwani, 2021).

Komitmen bersama secara sungguh-sungguh harus dimiliki oleh seluruh barisan negara baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk peranan dari segenap jajaran negara baik dari tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Dengan pernyataan tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah sepakat untuk mencanangkan dan mengikrarkan peningkatan pemberian layanan pada sasaran yang akan dicapai khususnya bagi masyarakat dengan kebijakan arah penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Beberapa hal yang terkait dengan usaha untuk mewujudkan *good governance* pada sektor pemerintahan antara lain meliputi penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran serta tanggung jawab akuntabilitas setiap organisasi kepada masyarakat (publik)

seperti sistem pengelolaan organisasi yang baik dan memadai serta pelaporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Segah, 2020).

Tata kelola yang baik dapat diwujudkan dengan diberlakukannya kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tata kelola yang baik dapat dimulai dari manajemen pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi dana investasi dengan memperhatikan berbagai akibat yang timbul jika terjadi, mencegah korupsi yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok baik di tingkat politik maupun administratif yang merugikan berbagai pihak, serta menjalankan disiplin anggaran dalam penciptaan *legal and political framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha. *Good governance* memiliki 5 (lima) prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang jika kelima prinsip ini diterapkan dalam suatu pemerintahan pada tingkat daerah maka *good governance* akan terwujud dan kualitas laporan keuangan dalam kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi lebih baik (Rachmawati & Anik, 2020).

Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi. Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat pengelolaan data yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Penggunaan sistem

informasi keuangan daerah dilakukan secara bertahap yang dimulai dari tahap pengelompokan, penggolongan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan yang nantinya berguna sebagai informasi oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pemrosesan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Rohmah dkk., 2020).

Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melaksanakan proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat serta mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik. Dalam kerangka ini, Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mengharuskan dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan pada tingkat nasional (Taufiqurrohman dkk., 2021)

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah dan membagikan informasi keuangan daerah kepada publik. Kemajuan teknologi yang pesat dan kemungkinan penggunaannya secara luas akan berpotensi membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan daerah dengan cepat dan akurat.

Kualitas sumber daya manusia merupakan sebuah elemen yang terpenting pada setiap lembaga. Mengembangkan kemampuan dan

komitmen karyawan baik secara individu maupun kelompok dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kualitas dan karakteristik yang dicari organisasi pada karyawannya tidak jauh terkait dengan tantangan persaingan yang dihadapi saat ini dan di masa depan. Untuk meminimalisir kesalahan perhitungan, laporan keuangan sebaiknya disusun oleh karyawan yang memiliki pengetahuan mengenai akuntansi secara memadai (Launtu, 2021).

Melansir dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), telah dikeluarkan laporan yang mengidentifikasi berbagai masalah dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan bahwa banyak pemerintah daerah belum menetapkan ruas jalan sesuai dengan fungsi dan kelas yang seharusnya. Hal ini mengindikasikan kurangnya pedoman dan standar teknis yang jelas dalam penyelenggaraan jalan. Selain itu, laporan tersebut mencatat adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi yang menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan hingga mencapai Rp226,59 miliar. Dalam aspek pengelolaan belanja, BPK juga menemukan masalah seperti kekurangan volume barang dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang berpotensi merugikan keuangan daerah hingga Rp249,52 miliar (BPK, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Amiria dkk., 2023) dan (Wahyuni, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Yanti dkk., 2020) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Admaja & Wahyundaru, 2020), (Irmawati dkk., 2019), dan (Muhammad Fadhil & Hapsari, 2023) mendapatkan bahwa kompetensi SDM di Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap Kualitas LKPD, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Aprisyah & Yuliati, 2021), dan (Animah dkk., 2020) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Anik, 2020) dan (Winarni dkk., 2020) menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Rohmah dkk., 2020) dan (Sari, 2022) menunjukkan bahwa variabel *good governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Motivasi dalam melakukan penelitian didasarkan pada fenomena yang telah terjadi dimana BPK menyatakan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah belum maksimal sehingga menarik minat peneliti dalam menjawab masalah yang ada. Harapan peneliti adalah supaya kedepannya pemerintah daerah lebih bertanggung jawab terhadap laporan yang akan disusun sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

Berdasarkan latar belakang, perbedaan penelitian, serta motivasi yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, *Good Governance*, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik?
2. Apakah terdapat pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik?

3. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibawah ini, seperti:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam pengembangan ilmu akuntansi dan sistem informasi akuntansi, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan di tingkat daerah.
 - b. Peningkatan Pemahaman: Penelitian ini dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara penerapan

SIKD, prinsip *good governance*, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

1. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan SIKD dan pengelolaan keuangan daerah, yang sangat berguna untuk studi akademis dan karir di masa depan.
2. Meningkatkan kemampuan analisis dan pemikiran kritis mahasiswa dalam menilai sistem keuangan dan akuntansi yang diterapkan di pemerintahan.

b. Bagi Universitas

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia industri dan pemerintahan, terutama di bidang akuntansi dan manajemen keuangan.
2. Mendorong penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi dan keuangan publik, sehingga dapat meningkatkan reputasi akademik universitas.

c. Bagi Pemerintah Daerah

1. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

2. Mendorong penerapan sistem akuntansi yang lebih baik serta praktik *good governance* yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.